

AGRIBISNIS SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN DAERAH: TANTANGAN DI TENGAH UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DAN EUFORIA DESENTRALISASI

Dradjad H. Wibowo dan M.H.R.S. Ario Putra

I PENDAHULUAN

Salah satu prasyarat utama dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia adalah pemilihan strategi pembangunan ekonomi yang dapat merangsang produksi domestik pada sektor-sektor terkait, dan memiliki multiplier pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat neraca pembayaran, sektor ekonomi yang berorientasi ekspor perlu diberi prioritas lebih tinggi. Dengan demikian, salah satu faktor fundamental dalam upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah, yaitu defisit neraca pembayaran, dapat lebih dikendalikan. Pada gilirannya, hal ini akan mempersempit rentang kelemahan-kelemahan fundamental perekonomian Indonesia yang bisa dijadikan sasaran spekulasi oleh pemain pasar uang internasional.

Prasyarat-prasyarat di atas menjadi sangat krusial karena krisis sistemik yang berkepanjangan di Indonesia ternyata bukan hanya membatasi aliran modal yang masuk ke sektor riil. Namun lebih utama lagi, krisis tersebut telah merusak akumulasi kapital yang ada sebelumnya. Penyebabnya, barang-barang modal yang dibeli sebelumnya tidak memperoleh perawatan yang optimal sehingga terjadi kerusakan modal yang lebih besar dan lebih cepat dari penyusutan modal pada kondisi normal.

Sebagai sebuah sektor ekonomi, agribisnis terlihat mampu memenuhi prasyarat-prasyarat di atas. Selain itu, karena mayoritas kegiatan agribisnis berlokasi di daerah, selain berpotensi menjadi *engine of growth* dalam pemulihan ekonomi, agribisnis juga berpotensi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi di daerah, khususnya pada masa-masa awal penerapan otonomi daerah saat ini. Yang menjadi masalah adalah, apakah potensi-potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh seluruh pelaku ekonomi. Padahal di lain pihak, tantangan dan masalah yang berpotensi menghadang realisasi potensi agribisnis tersebut sangatlah besar. Belum lagi dengan munculnya

euforia desentralisasi (otonomi daerah), yang bukan tidak mungkin justru berakibat kontra-produktif terhadap pembangunan agribisnis.

Bagian pertama dari tulisan ini akan membahas potensi agribisnis sebagai lokomotif pemulihhan ekonomi Indonesia. Karena lokasi agribisnis kebanyakan berada di daerah, potensi tersebut juga menjadikan agribisnis berpeluang menjadi soko-guru perekonomian daerah, dengan syarat desentralisasi dan otonomi daerah didisain sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh negatif terhadap pembangunan. Bagian kedua akan membahas potensi dampak negatif dari euforia desentralisasi yang terjadi saat ini. Pada bagian berikut akan dibahas berbagai hambatan yang dapat membuat potensi agribisnis di atas tidak direalisasikan secara optimal.

II POTENSI AGRIBISNIS DALAM PEREKONOMIAN

Secara empirik, sektor agribisnis, baik yang benar-benar bersifat budi daya pertanian dan/atau pemanfaatan sumber daya alam hayati *per se*, maupun yang berupa industri hulu/hilir dan jasa berbasis pertanian, ternyata menjadi salah satu sektor yang paling memenuhi prasyarat-prasyarat di atas. Pernyataan ini didasarkan pada analisis keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dari sebuah sektor ekonomi dengan sektor ekonomi lainnya, dengan menggunakan tabel Input-Output. Walaupun analisis ini bersifat statik, dan koefisien Input-Output antar-sektor berubah drastis selama masa krisis, namun di tengah keterbatasan data, analisis ini bisa memebrikan petunjuk awal. Apalagi, hasil analisisnya didukung oleh perkembangan empirik pada saat krisis.

Konsep keterkaitan (*linkage*) itu sendiri bisa dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Pertumbuhan industri kayu sebagai akibat kenaikan permintaan pada sektor konstruksi dan industri mebel, misalnya, merupakan contoh keterkaitan langsung. Sementara itu peningkatan permintaan terhadap barang modal seperti mesin-mesin penggergajian merupakan contoh keterkaitan tidak langsung.

Dari 20 industri ekspor utama Indonesia, berdasarkan Tabel Input-Output 1995, ternyata agribisnis (termasuk agribisnis) lah yang memiliki total keterkaitan terbesar (Tabel 1). Industri perabot rumah tangga dari kayu, bambu dan rotan, misalnya, memiliki nilai keterkaitan total yang tinggi, yaitu 2,61. Sektor ini disusul oleh industri kayu lapis dan

sejenisnya, dengan nilai sebesar 2,44. Kedua nilai di atas jauh di atas nilai rata-rata keterkaitan seluruh industri sebesar 2,00.

Memang nilai total keterkaitan tertinggi, yaitu 2,85, dimiliki oleh industri tekstil jadi (kecuali pakaian. Namun tergantung pada definisi yang dipakai, tidak sedikit pakar agribisnis yang menggolongkan tekstil ke dalam sektor agribisnis.

Di lain pihak, keterkaitan total yang dimiliki oleh industri ekspor di luar agribisnis ternyata jauh lebih rendah. Nilai tertinggi dimiliki oleh perabot rumah tangga dan kantor dari logam, yaitu 2,09. Industri elektronika, yang merupakan salah satu ekspor andalan Indonesia, hanya memiliki nilai keterkaitan 2,05. Sementara industri perlengkapan listrik di luar elektronika dan alat listrik rumah tangga justru memiliki nilai keterkaitan yang di bawah rata-rata seluruh industri, yaitu 1,65.

Jadi dari sisi keterkaitan antar-sektor, agribisnis dengan orientasi ekspor terbukti sangat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak. Pengaruh ini bahkan lebih besar dari industri berorientasi ekspor lainnya.

Dari sisi multiplier pendapatan, agribisnis kembali menunjukkan potensi yang lebih besar dibandingkan sektor non-agribisnis. Nilai tertinggi dipegang oleh industri ban, yaitu 3,40. Artinya, setiap unit pertambahan permintaan pada industri ban dapat meningkatkan pendapatan di masyarakat sebesar 3,4 kali lipat. Namun demikian, nilai keterkaitan total dari industri ban hanya 2,05. Akibatnya, dari sisi pemerataan, kenaikan pendapatan yang tinggi dari industri ban ini relatif tidak didistribusikan dengan sangat merata kepada sektor-sektor lainnya.

Walaupun begitu, sektor agribisnis lainnya justru memiliki multiplier pendapatan dan tingkat keterkaitan yang tinggi. Industri perabot rumah tangga dari kayu, bambu dan rotan, misalnya, memiliki nilai multiplier pendapatan sebesar 2,92. Sementara industri kayu lapis dan sejenisnya memiliki nilai 2,64. Dengan demikian, keduanya merupakan kelompok industri potensial yang perlu didorong pertumbuhannya dalam rangka pemulihan ekonomi. Ini karena, pertama, industri tersebut mampu menciptakan pendapatan yang tinggi di masyarakat untuk setiap pertambahan satu unit permintaan atas outputnya. Kedua, industri-industri tersebut juga sangat ideal dari sudut pandang

pemerataan. Dengan tingkat keterkaitan yang tinggi, kenaikan pendapatannya tidak akan terkonsentrasi kepada kedua industri ini saja, tapi akan didistribusikan secara lebih merata kepada kelompok industri lainnya. Konsekwensinya, akan makin banyak kelompok masyarakat yang dapat menikmati kenaikan pendapatan tersebut. Ketiga, industri-industri di atas merupakan ekspor andalan Indonesia, sehingga dapat membantu upaya perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pada gilirannya, ini akan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, sehingga perekonomian kita akan makin tahan terhadap shock jangka pendek yang muncul karena gejolak politik, misalnya.

Di lain pihak, industri ekspor di luar agribisnis ternyata memiliki multiplier pendapatan yang relatif jauh di bawah agribisnis. Yang tertinggi adalah industri elektronika (2,68) lalu disusul oleh industri barang-barang plastik (2,59). Selain itu, kedua industri ini memiliki keterkaitan yang relatif lebih rendah dari agribisnis. Artinya, peningkatan pendapatan yang lebih kecil tersebut ternyata terkonsentrasi kepada sangat sedikit sektor. Dengan demikian, walaupun elektronika merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia, namun bagi pemulihan ekonomi Indonesia, industri ini masih kalah potensial dibandingkan dengan agribisnis. Ini dapat dilihat dari sudut pendapatan maupun pemerataan sekaligus.

Potensi di atas ternyata dibuktikan oleh kinerja sektor agribisnis pada masa terburuk dari krisis. Selama periode kuartal I (Q1) 1998 hingga Q1/1999, dari 88 sektor industri utama di Indonesia, baru 27 yang menunjukkan tanda pemulihan produksi. Kriterianya, tingkat produksi mereka sudah meningkat hingga mencapai tingkat produksi sebelum krisis, yaitu tahun 1996. Dari ke-27 sektor tersebut, 17 diantaranya adalah kelompok agribisnis.

Hebatnya, jenis-jenis industri dalam kelompok agribisnis ternyata makin banyak yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hingga Q4/1999 tercatat sudah 55 sektor yang produksinya meningkat, 29 diantaranya adalah agribisnis. Termasuk di dalam kelompok yang mulia pulih adalah industri tekstil jadi (kecuali pakaian), industri perabot dari kayu, bambu dan rotan, industri minyak goreng sawit, industri tepung terigu, industri *crumb rubber* dan barang-barang karet, industri susu dan berbagai agribisnis lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif pada beberapa kuartal terakhir ini jelas tidak terlepas dari kontribusi kelompok agribisnis di atas.

Dengan data empirik di atas, jelas bahwa sektor agribisnis perlu digenjot lebih lanjut agar perekonomian Indonesia cepat pulih, sekaligus agar pemulihan ini semakin merata ke banyak sektor lainnya. Pilihan strategik ini jelas mempunyai *social cost-benefit ratio* yang tinggi. Ini karena dana pembangunan akan dialokasikan kepada sektor yang memang memiliki kapasitas peningkatan pendapatan, pemerataan dan penguatan neraca pembayaran yang relatif lebih tinggi dari sektor lainnya. Dengan demikian, dana pembangunan yang langka, baik dari APBN maupun investasi PAM dan PMDN, dapat dialokasikan kepada sektor yang memberikan *social benefits* terbesar.

III EUFORIA DESENTRALISASI DAN EFEKNYA BAGI AGRIBISNIS

Tinjauan Ekonomi Politik

Secara ekonomi politik, bahwa desentralisasi merupakan agenda nasional yang mutlak harus dilakukan adalah satu hal yang tak terbantahkan. Namun dalam perkembangannya, desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi mantra ‘kebenaran mutlak politik’ (*political correctness*) sehingga suara-suara kritis terhadap *disain* desentralisasi (bukan desentralisasinya sendiri) seringkali di-cap sebagai anti-desentralisasi dan/atau pro-sentralisasi. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang terseret menuju euforia desentralisasi, dan tanpa sadar terjebak jargon “pokok-e desentralisasi”. Mereka lalai akan pentingnya keberadaan sebuah *disain* desentralisasi yang menjadi konsesus nasional sehingga efek kontra-produktifnya bisa diminimumkan.

Euforia di atas tidak hanya menghinggapi pemerintah daerah yang memang untuk pertama kalinya akan memperoleh otonomi “penuh” dalam mengelola daerahnya. Namun juga terjadi pada berbagai unsur pemerintah (seperti Kementerian Negara Otonomi Daerah) dan lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF, terutama sepanjang 1999. Baru pada Februari 2000, dalam konferensi internasional tentang desentralisasi di Jakarta, Bank Dunia dan IMF mulai secara publik mengakui bahwa agenda desentralisasi saat ini berlangsung terlalu cepat. Selain itu, disainnya sendiri belum disiapkan dengan matang, sehingga justru dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia.

Di daerah, euphoria tersebut muncul karena beberapa faktor. Pertama adalah berlebihannya antusiasme pemerintah daerah (terutama mereka yang kaya sumber daya alam) untuk segera memperoleh otonomi. Antusiasme ini muncul karena adanya *asymmetric expectation*, di mana otonomi ditafsirkan lebih sebagai peluang penambahan wewenang dan anggaran daerah. Padahal otonomi juga mengandung arti peningkatan tanggungjawab dalam bidang pelayanan masyarakat daerah, dan ini mempunyai konsekwensi perencanaan pembangunan, sumber daya manusia dan alokasi sumber daya yang cukup pelik. Kedua, rendahnya tingkat kepercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga setiap upaya untuk memperbaiki desain desentralisasi dianggap sebagai langkah anti-desentralisasi untuk mempertahankan kewenangan pusat. Kondisi ini bukan salah daerah sepenuhnya. Ada pengalaman historis yang panjang, di mana selama hampir dua setengah abad pemerintah pusat tidak melaksanakan dengan konsisten amanat UU No 5/1974 tentang pemerintahan daerah. Ketiga, pemerintah pusat hingga saat ini masih belum menyusun sebuah desain desentralisasi yang *workable* dan disepakati semua *stakeholders* yang terlibat. Belum ada aturan main yang jelas, yang menjadi konsesus antara pusat dengan daerah, antara daerah yang kaya dan yang miskin sumber daya alam, maupun antar berbagai pemain di tingkat pusat.

Di lain pihak, kepentingan para investor, baik PMA maupun PMDN, seolah-olah diabaikan dalam berbagai diskusi tentang desentralisasi. Kalau pada masa Orba, para investor tersebut dapat menekan hak daerah dan masyarakat lokal melalui kolusinya dengan aparat birokrasi dan militer, maka kondisinya saat ini terbalik. Di beberapa lokasi, pemerintah daerah dan masyarakat lokal mulai menekan hak investor, sehingga yang muncul adalah peningkatan ketidakpastian usaha. *Business risk* (terutama *political* dan *operational risks*) pun meningkat, dan bagi investor asing, hal ini membuat *country risk* Indonesia semakin tinggi. Akibatnya, *value-at-risk* bagi investasi sektor riil di Indonesia ikut naik, sehingga membuat banyak investor (baik domestik maupun asing) mengambil posisi *hold* dalam bisnisnya.

Secara empirik kualitatif, kondisi di atas dapat dengan mudah diketahui dari interaksi penulis dengan berbagai kalangan pelaku usaha di Indonesia, baik PMA maupun PMDN. Sementara itu secara kualitatif, rendahnya tingkat penanaman modal di Indonesia selama dua tahun terakhir ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan.

Sebagai misal, untuk pertama kalinya dalam tiga dasawarsa, Indonesia dikalahkan oleh Korea Selatan dalam menarik *foreign direct investment* (FDI), padahal hingga awal 1990-an, Korea masih dikenal anti-asing dalam hal FDI. Pada tahun 1999, realisasi FDI di Korea mencapai US\$ 11 miliar, sementara Indonesia hanya mencatat persetujuan PMA sekitar US\$ 10,6 miliar. Realisasinya diperkirakan sekitar US\$ 2 miliar. Walaupun euforia desentralisasi bukan satu-satunya penyebab situasi di atas, namun tidak dapat dipungkiri kalau hal ini merupakan salah satu faktor utama.

Contoh-contoh dari euforia desentralisasi saat ini cukup banyak, baik yang langsung melibatkan sektor agribisnis, maupun yang tidak. Namun, walaupun tidak melibatkan agribisnis, contoh kasus tersebut tetap bisa berdampak negatif bagi investasi agribisnis. Ini karena banyak kemiripan antara berbagai kasus tersebut, baik yang menyangkut lokasi usaha yang di daerah, luasnya bentang wilayah yang terlibat, ketidakpastian usaha yang ditimbulkannya dan perlindungan hukum yang tidak memadai.

Sebagai misal adalah kasus hak pengusahaan hutan (HPH) dan industri kayu di berbagai daerah. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali lahan HPH yang dikelola tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari. Kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan HPH, serta ketidakadilan dalam pembagian keuntungan ekonomi dari pengelolaan hutan antara pusat dan daerah juga sudah menjadi pengetahuan publik.

Namun euforia desentralisasi yang berpotensi lebih merusak kelestarian hutan juga perlu menjadi keprihatinan bersama. Di Sulawesi, misalnya, dengan harapan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), beberapa bupati bersiap-siap mendirikan perusahaan Daerah Kabupaten yang bergerak dalam pemanfaatan hasil hutan. Akibatnya, hutan yang semestinya merupakan satu kesatuan ekologis malah dibagi-bagi dalam batas-batas administratif kabupaten, yang unitnya jauh lebih kecil dari unit HPH. Karena faktor *economies of scale*, di mana perusahaan yang memiliki areal hutan kecil akan berusaha meningkatkan tingkat pemanenannya agar tercapai skala usaha yang ekonomis, kondisi di atas jelas lebih merusak kelestarian hutan.

Dari sisi integritas ekonomi pun, mulai muncul gejala yang mengkhawatirkan, baik secara politik maupun ekonomi. Seorang Gubernur di Kalimantan mulai mencanangkan,

HPH di propinsinya hanya bisa beroperasi kalau putra/perusahaan daerah ikut menjadi pemilik saham. Secara populis, hal ini tampaknya seperti langkah yang tepat. Namun, kalau gejala ini meluas, yang terjadi adalah peningkatan hambatan investasi (*investment barrier*) yang bisa mengakibatkan disintegrasi Indonesia secara ekonomi dan peningkatan biaya investasi. Padahal, di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Australia sekalipun, tidak ada aturan yang mengharuskan dilibatkannya investor satu negara bagian kalau penanam modalnya adalah investor dari negara bagian lain.

Contoh kasus yang lainnya adalah ancaman penutupan perusahaan pulp-rayon PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara, tuntutan Pemda Kaltim untuk memiliki 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang setara dengan Rp 2 trilyun, kasus yang melibatkan PT Newmont Minahasa serta tuntutan pemilikan 100% oleh Pemda Riau terhadap pengelolaan blok berkapasitas 70 ribu barel/hari dari PT Caltex Pacific Indonesia. Walaupun tuntutan-tuntutan di atas merupakan buntut ketidakadilan di masa lalu, namun euforia yang berlebihan membuat tuntutan di atas bergerak ke ekstrem yang lain. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan *country risk* Indonesia di mata investor, termasuk mereka yang bergerak di bidang agribisnis.

Disain Desentralisasi

Secara teknis, agenda desentralisasi itu sendiri tampak dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga disain-nya tidak disiapkan dengan matang. Kelemahan ekonomi-politik di atas pun merupakan akibat dari disain yang tidak memadai. Misalnya, tentang sejauh mana pemerintah daerah, baik propinsi dan kabupaten/kota, berhak menuntut hak kepemilikan terhadap entitas bisnis yang legalitasnya bersumber dari perjanjian dengan pemerintah pusat di masa lalu.

Kelemahan disain yang lainnya terlihat dari minimnya mekanisme resolusi konflik antar daerah, baik yang menyangkut sektor agribisnis maupun tidak. Dalam sektor agribisnis, misalnya, pada tahun 1999 pernah terjadi konflik antara nelayan kabupaten Sampang dengan Pasuruan yang bersumber dari ketidakjelasan batas wilayah tangkapan. Konflik semacam ini sangat mungkin terjadi untuk sektor agribisnis yang memanfaatkan sumber daya alam, misalnya masalah pengaturan air irigasi antar kabupaten. Hingga saat

tulisan ini disusun, mekanisme resolusi konflik untuk masalah semacam ini masih belum jelas.

Pada sektor angkutan pun, konflik di atas juga muncul. Pemda DKI dan Tangerang, misalnya, bulan Agustus ini saling mengancam akan menerapkan retribusi taksi terhadap kendaraan yang berasal dari daerah tetangganya. Kalau konflik semacam ini berkembang untuk angkutan hasil pertanian, padahal komoditi pertanian *perishable* seperti buah dan sayuran seringkali melintasi banyak kabupaten sebelum sampai ke tujuan pemasaran, bisa dibayangkan akibat negatifnya bagi usaha agribisnis di daerah produsennya.

Secara legal pun, UU No 22/1999 dan UU No. 25/1999 memang didisain untuk bias terhadap sumber daya alam. Kedua UU tersebut justru memberikan imbalan bagi peningkatan konsumsi sumber daya alam (misalnya pertambangan dan kehutanan), tapi justru menghukum konservasi. Ini terlihat misalnya dari pasal 80 UU No. 22/1999 dan Bab 3 UU No. 25/1999. Akibatnya, daerah seperti Kabupaten Kerinci di Jambi, di mana 60% wilayahnya masuk dalam Taman nasional Kerinci-Seblat, justru tidak bisa meningkatkan PAD-nya karena harus melakukan konservasi. Sementara tetangganya, yaitu Kabupaten Bangko, di mana hutannya sudah dibagi-bagi dalam HPH, justru berpeluang meningkatkan PAD melalui peningkatan pemanfaatan hutan. Kondisi di atas berpotensi mendorong pembangunan agribisnis yang tidak mengindahkan daya dukung ekologi wilayah.

Dengan berbagai kelemahan di atas, terlihat bahwa euforia desentralisasi yang terjadi saat ini justru bisa menjadi bumerang bagi pembangunan agribisnis di daerah. Hal ini perlu segera disadari oleh semua *stakeholders*, terutama oleh pemerintah daerah dan Kementerian Negara Otonomi Daerah, sehingga upaya perbaikannya bisa segera dilakukan.

III BERBAGAI PERMASALAHAN LAINNYA¹

Potensi untuk meningkatkan peran sektor agribisnis dalam perekonomian daerah sebenarnya masih terbuka lebar, baik dalam konteks peningkatan pendapatan maupun pemerataan antar-sektor di daerah. Namun potensi tersebut tidak tergarap secara optimal karena terhadang oleh berbagai permasalahan, baik yang sifatnya struktural maupun yang berkaitan dengan krisis ekonomi.

Kondisi di atas masih diperburuk oleh ketidakjelasan strategi pemerintah dalam mengembangkan agribisnis. Lemahnya koordinasi antar instansi juga menambah runyam persoalan. Lebih menyedihkan lagi, kalau dulu kelemahan koordinasi ini baru merupakan egoisme sektoral, sekarang malah diperberat oleh konflik kepentingan politik antara menteri-menteri yang bertentangan afiliasi politiknya. Akibatnya, tidak sedikit potensi agribisnis yang tidak dioptimalkan pemanfaatannya. Bahkan pada kasus tertentu, seperti misalnya dalam kasus penentuan cukai rokok dan tarif impor gula, kelemahan di atas justru merugikan industri yang bersangkutan.

Permasalahan besar yang menghadang agribisnis bisa diuraikan sebagai berikut. Pertama, lambat dan buruknya proses *corporate restructuring* di BPPN. Masalah ini merupakan satu *setback* utama karena besarnya proporsi aset agribisnis yang dikuasai BPPN. Dari total aset sebesar Rp 112 trilyun yang dikelola oleh Aset Manajemen Investasi (AMI) BPPN, 40%-nya berasal dari agribisnis. Seandainya semua industri makanan digolongkan agribisnis, proporsi ini bahkan mencapai 44%.

Dengan demikian, berdasarkan nilai buku, setidaknya terdapat aset agribisnis senilai Rp 45 trilyun yang dikuasai oleh AMI. Repotnya, di antara aset-aset tersebut terdapat banyak *blue chips* agribisnis yang sebelum krisis menjadi *engine of growth* sektor ini. Sebagai misal adalah tambak udang Dipasena, industri minyak sawit terintegrasi milik grup Salim, industri olechemical Salim dll. Aset-aset ini harus direstrukturisasi sehingga menjadi cukup sehat untuk didivestasikan.

¹ Bagian ini diambil dari tulisan Dradjad Wibowo dalam majalah *Komoditas* Tahun II, No. 24, 17 Juli – 9 Agustus 2000, hlm. 84-85.

Namun proses restrukturisasi ini ternyata sangat lambat dan terhadang oleh banyak masalah. Dipasena, misalnya, menjadi semacam “macan kertas” karena konflik sosial yang berkepanjangan antara petambak dengan perusahaan inti membuat aset ini sulit dijual. Demikian juga dengan restrukturisasi perusahaan agribisnis di bawah Salim.

Tampaknya salah satu sumber persoalannya adalah keterbatasan tenaga profesional yang benar-benar ahli dan mengusai agribisnis di BPPN. Kebanyakan staff BPPN berasal dari bank-bank beku operasi (BBO), yang secara profesional ikut bertanggungjawab atas kredit macet di bank-bank mereka sebelumnya. Kalau kini mereka menjadi “dokter” dalam *corporate restructuring*, maka tidaklah berlebihan kalau orang luar mempertanyakan kapabilitas mereka. Apalagi sektor agribisnis bukan hanya menuntut kapasitas teknis finansial saja. Pimpinan dan staff BPPN perlu lebih menguasai masalah-masalah non-teknis, seperti sosiologi dan antropologi masyarakat lokal di mana aset agribisnis tersebut beroperasi. Tanpa kapasitas ini, jangan harap BPPN akan mampu menjembatani konflik sosial yang sekarang marak di lokasi berbagai aset agribisnis.

Kinerja BPPN di Aset Manajemen Kredit (AMK) untuk sektor agribisnis juga jauh dari memuaskan. Dari total aset AMK senilai Rp 234 trilyun, 49% diantaranya terkait dengan agribisnis. Jadi, terdapat aset agribisnis senilai Rp 115 trilyun di BPPN. Tapi seperti AMI, proses pengembalian kredit dari aset-aset ini pun terhadang masalah-masalah yang serupa.

Kelambatan di atas jelas berdampak luar biasa terhadap perekonomian. Setidaknya, sekitar Rp 160 trilyun aset agribisnis ternyata mengendap di BPPN! Padahal sebelum krisis, agribisnis paling tidak menyerap 20% dari total alokasi kredit perbankan. Namun proporsi ini bisa lebih besar lagi karena tidak sedikit jenis agribisnis yang dimasukkan kedalam sektor industri. Dengan lambatnya restrukturisasi korporat agribisnis, tidak heran kalau daya serap kredit sektor ini pun masih belum pulih. Jadi sangat wajar kalau sektor perbankan mengalami kelebihan likuiditas di atas Rp 400 trilyun dan terus meningkat. Ini karena, salah satu penyerap kredit terbesarnya masih belum pulih.

Masalah yang kedua berkaitan dengan pembiayaan. Investasi untuk mengembangkan agribisnis sebenarnya sangat besar. Untuk membangun industri berbasis perkebunan

saja, diperlukan setidaknya Rp 300 trilyun. Belum lagi industri berbasis kehutanan, perikanan dan tanaman pangan. Namun arus *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Indonesia masih sangat minim. Euforia desentralisasi yang dibahas sebelumnya justru membuat banyak investor asing berfikir ulang mengenai investasinya di Indonesia.

Ironinya, di satu sisi agribisnis memerlukan dana yang besar. Di sisi lain, kegagalan BPPN membuat daya serap kredit dari sektor ini belum bisa pulih. Namun demikian, menarik FDI ke agribisnis pun bukan hal yang mudah. Konflik sosial yang merebak di banyak daerah membuat *political* dan *business risks* untuk sektor ini masih tinggi.

Dari sisi kelestarian lingkungan, tekanan internasional terhadap pemanfaatan SDA di Indonesia saat ini semakin meningkat. Untuk produk kehutanan, misalnya, tuntutan diberlakukannya ekolabel sudah menjadi keharusan. Tidak sedikit buyers besar di Eropa dan Amerika Utara yang mencanangkan sertifikasi ekolabel bagi barang yang diimpornya. HomeDepot, misalnya, yang merupakan furniture chain terbesar di AS, mentargetkan pada tahun 2002 semua produk impornya sudah bersertifikasi ekolabel. Di Eropa pun demikian. Dan jumlah hutan yang bersertifikat ekolabel di dunia juga melonjak drastis selama empat tahun terakhir. Semula, sejak 1990-1996, hanya sekitar 1 juta hektar yang bersertifikat. Sekarang sudah naik menjadi 20 hektar.

Karena untuk memperoleh sertifikat memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka ini bisa menjadi masalah bagi agribisnis kehutanan. Mengingat kayu dan produknya merupakan ekspor utama Indonesia, maka perlu kerjasama semua pihak agar sertifikasi tersebut tidak menjadi beban, namun tetap menjamin pengelolaan SDA secara elstari.

Selain masalah besar di atas, terdapat berbagai masalah mikro yang tidak kalah pentingnya. Ini meliputi tidak jelasnya insentif fiskal bagi agribisnis. Sebagai misal, rejim cukai rokok yang belum mencerminkan asas keadilan, di mana terdapat diferensiasi tingkat cukai untuk produsen yang berbeda. Bahkan dengan adanya euforia desentralisasi, banyak kegiatan agribisnis yang mungkin akan dijadikan lahan bagi peningkatan PAD oleh sementara kalangan dalam pemerintah daerah. Dengan demikian, yang muncul justru disinsentif fiskal. Selain masalah tersebut, persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bisa menjadi batu sandungan kalau tidak tertangani secara benar.

IV PENUTUP

Potensi agribisnis dalam upaya pemulihan ekonomi, dan sekaligus sebagai pilar perekonomian daerah, sebenarnya sangat besar. Namun tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan potensi tersebut tidaklah kecil, terutama dengan adanya euforia desentralisasi saat ini. Disamping itu, kelambatan proses restrukturisasi korporat terhadap aset-aset agribisnis yang dikuasai oleh BPPN juga ikut memperberat tantangan tersebut. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah perumusan strategi agribisnis yang menyeluruh dari pemerintah, di mana semua instansi terkait dapat berkoordinasi dengan baik. Jawaban atas permasalahan-permasalahan di atas jelas tidak mudah, dan memerlukan pemikiran yang komprehensif. Mungkin ada baiknya kalau diadakan Forum Agribisnis, di mana semua *stakeholders* bisa duduk bersama-sama untuk mencari solusi bagi masalah-masalah di atas.

Daftar Pustaka

Ramdani, D. (1999). "Komoditas Ekspor untuk Stimulasi Pemulihan Ekonomi", *Buletin Bisnis dan Ekonomi Politik*, Jakarta, INDEF.

Wibowo, D.H. (2000). "Agroindustri sebagai Mesin Pertumbuhan", *Komoditas*, Tahun II, No. 24, 17 Juli – 9 Agustus 2000, hlm 82-83.

Wibowo, D.H. (2000). "Agroindustri: Peta Masalah dan Pengembangannya", *Komoditas*, Tahun II, No. 24, 17 Juli – 9 Agustus 2000, hlm 82-83.

Tabel 1
Keterkaitan Output Sektor-Sektor Ekspor Utama

Kode IO	Sektor	Kaitan Langsun g	Sebaran Belakang Langsung	Kaitan Tak langsung	Sebaran Belakang Tak langsung	Total Kaitan
74 Tekstil		1.12	1.49	1.05	0.95	2.17
75 Tekstil jadi kecuali pakaian		1.54	1.61	1.31	0.82	2.85
76 Barang-barang rajutan		0.65	0.92	0.86	1.09	1.51
77 Pakaian jadi		1.46	1.40	1.26	0.82	2.72
78 Permadani, tali dan tekstil lainnya		1.17	0.66	1.08	0.87	2.25
79 Kulit samakan dan olahan		1.15	1.23	1.09	0.91	2.24
80 Barang-barang dari kulit		0.90	0.95	1.01	0.93	1.91
81 Alas kaki		0.91	0.62	0.99	0.93	1.91
83 Kayu lapis dan sejenisnya		1.34	1.12	1.10	0.91	2.44
85 Perabotan rumah tangga terbuat dari kayu, bambu dan rotan		1.38	0.95	1.22	0.80	2.61
93 Pupuk		0.59	0.93	0.80	1.15	1.40
106 Ban		1.43	1.74	1.35	0.82	2.78
107 Barang-barang plastik		0.88	0.95	0.96	0.98	1.84
116 Barang-barang dari logam bukan besi		0.77	0.81	0.92	1.11	1.69
117 Alat-alat dapur, pertukangan dan pertanian dari logam		0.80	0.60	0.93	1.00	1.73
118 Perabot rumah tangga dan kantor dari logam		1.05	0.72	1.04	0.90	2.09
120 Barang-barang logam lainnya		0.89	0.87	0.96	0.97	1.85
125 Barang-2 elektronika, komunikasi dan perlengk		1.03	0.77	1.02	1.02	2.05
126 Alat listrik untuk rumah tangga		1.04	0.94	1.03	0.96	2.07
127 Perlengkapan listrik lainnya		0.75	0.62	0.90	1.09	1.65
Rata-rata		1.00	1.00	1.00		2.00

Sumber: Ramdani (1999)